

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kewenangan Regulatori Presiden	16

B. Hukum Tata Negara Darurat	20
C. Sejarah dan Hakikat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia	26
D. Keadaan Bahaya dan Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa	32
E. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Konstitusi Indonesia	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Sifat dan Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	43
D. Analisis Hasil	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Analisis Pelaksanaan Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.....	47
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi	52
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang	

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	61
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	75
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	78
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan	86
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	91
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virusdisease 2019</i> (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.....	105
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	115

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	120
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja	125
B. Penataan Pelaksanaan Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa dalam Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia	146
1. Praktik Pelaksanaan Aturan Sejenis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Berbagai Negara dengan Sistem Pemerintahan Presidensial	146
2. Konsep Penataan Aturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia	157
3. Penguatan Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Parameter Ihwal Kegentingan yang Memaksa	184
BAB IV PENUTUP	207
A. Kesimpulan	207
B. Saran	210
DAFTAR PUSTAKA	212